

**Kerangka Acuan Kegiatan**  
**PENILAIAN KOTA MANDIRI (PKM)**  
**Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

## **A. LATAR BELAKANG**

Program KOTAKU sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanganan kumuh secara berkelanjutan. Berdasarkan strategi KOTAKU, tahun 2015-2016 substansi pendampingan program KOTAKU memasuki tahap awal, dimana pendampingan yang dilaksanakan pada tahap awal ini diharapkan mampu menjadikan Pemerintah Kota/ Kabupaten sebagai Nakhoda dalam penanganan kumuh dan masyarakat dapat secara mandiri siap mendukung pencapaian 100 0 100.

Berdasarkan hal tersebut diatas dipandang penting untuk setiap kota/kabupaten dampingi Program KOTAKU melaksanakan penilaian terhadap progres kotanya melalui PENILAIAN KOTA MANDIRI (PKM). Adapun indikator/aspek yang dinilai dalam PKM sudah disesuaikan dengan kerja-kerja Penanganan Kumuh kedepan.

## **B. TUJUAN**

Penilaian ini bertujuan untuk diperolehnya progres kota/kabupaten sebagai Nakhoda dalam penanganan kumuh melalui KOTAKU.

Adapun tujuan khusus dari penilaian tersebut adalah :

1. Tim Korkot dan Pemerintah Daerah memahami dan menyadari indikator-indikator PKM dalam mengelola KOTAKU secara mandiri.
2. Tim korkot mampu mendorong progres pemerintah daerah dalam mengelola KOTAKU secara mandiri dan Pemerintah Daerah memiliki komitmen serta kesiapan untuk mengelola KOTAKU.
3. Diketahui rangking Kota/Kabupaten yang memiliki progres terbaik untuk mengelola KOTAKU tingkat Provinsi dan Nasional.

## **C. KELUARAN YANG DIHARAPKAN**

1. Tim Korkot dan POKJA PKP memiliki tujuan serta indikator yang sama dalam rangka mempersiapkan Kota/Kabupaten untuk mengelola KOTAKU secara mandiri.
2. Tim Korkot dan Tim Pemda secara bersama-sama mampu menilai progres kota/kabupatennya masing-masing serta memiliki rumusan strategi pemenuhan indikator.
3. Rangking kota/kabupaten yang memiliki progrs terbaik untuk mengelola KOTAKU secara Mandiri.

## D. METODOLOGI

Dilevel kota, bentuk kegiatan dalam Penilaian Kota Mandiri (PKM) ini berupa Diskusi Kelompok Terarah (DPT/FGD) dengan menggunakan format Penilaian Kota Mandiri. Setelah format penilaian terisi, peserta FGD diajak merumuskan strategi perbaikan terhadap nilai indikator yang belum maksimal dan menyusun rencana tindak untuk memenuhi indikator yang belum tercapai.

Dilevel Provinsi, bentuk kegiatannya merekap/merangking nilai semua kota/kabupaten dan menginformasikannya kepada Korkot dan Pemda. Dilevel provinsi juga melakukan analisa terhadap nilai indikator yang cukup mencolok untuk ditindak lanjuti.

Dilevel Pusat, bentuk kegiatannya merekap/merangking nilai semua kota yang dikirim dari Provinsi dan menayangkannya di Web KOTAKU. Dilevel Pusat juga melakukan analisa terhadap nilai indikator yang cukup mencolok untuk ditindak lanjuti.

## E. WAKTU

Kegiatan Penilaian kota Mandiri (PKM) ini dilakukan disemua kota kabupaten yang menjadi lokasi KOTAKU. Penilaian dilaksanakan 5 bulan sekali, khusus untuk penilaian tahun 2017 tahap 1 dilaksanakan bulan Mei-Juni dan tahap 2 bulan November-Desember .

## F. PESERTA

Peserta FGD/DPT Penilaian Kota Mandiri (PKM) ini terdiri dari para stakeholder Kota/Kabupaten sebagai berikut :

No.	Unsur Peserta
1.	Tim Korkot
2.	Bappeda
3.	Tim Teknis/Pokja PKP/Pokjanis
4.	TKPKD
5.	KBP
6.	Forum BKM
7.	Satker/PPK
8.	DPRD
9.	Pihak Berkaitan lainnya.

Nara Sumber dan Pemandu :

No.	Unsur
1.	Satker/PPK

2.	Team Leader / TA LG
3.	Korkot
4.	Pemandu Pemda

## **G. PEMBIAYAAN**

Biaya kegiatan FGD/DPT ini dibebankan kepada anggaran Daerah dan atau bersamaan dengan kegiatan yang ada dalam kontrak konsultan.

## **H. PELAPORAN**

Laporan pelaksanaan kegiatan disusun oleh Pelaksana dari Korkot dan Pemda; dalam bentuk proceeding disertai keluaran (output) kegiatan. Laporan dibuat dan diserahkan kepada Pemda dan di cc ke KMW paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan selesai.

## **I. PENUTUP**

Kerangka acuan pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai acuan bersama bagi pihak-pihak terkait, khususnya pelaksana kegiatan di Provinsi dan Kota untuk koordinasi selama pelaksanaan kegiatan.

*Jakarta, 01 September diperbaharui 05 April 2017*

**PENILAIAN KOTA MANDIRI :**  
**KAB/KOTA BERDASARKAN ASPEK PENILAIAN**  
**PROVINSI :**  
**KOTA/KABUPATEN :**

No	Aspek	Indikator	Bobot	Nilai	Batasan penilaian	Nilai Kota / Kab	Keterangan/ Penjelasan
1	<b>Kelembagaan</b>	Pokja PKP (Lembaga Sejenis) Aktif Fasilitasi penanganan kumuh	15%	2	Ada Pokja PKP (terbentuk, ada sekretariat, <i>support</i> BOP, rencana kerja dan aktif)		Jelaskan sekretariat dimana, BOP berapa, rencana kerja, gambaran keaktifan
				1	Ada Pokja PKP atau lembaga sejenis		
				0	Belum ada Pokja PKP atau lembaga sejenis		
2	<b>Dokumen Perencanaan</b>	Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota/Kabupaten	15%	2	Ada dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kota/Kabupaten dan sudah diaplikasikan		Jelaskan nama dokumen hasil proses review atau menyusun baru
				1	Sudah ada dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kota/Kabupaten		
				0	Belum ada dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kota/Kabupaten		
3	<b>Kemitraan Kota/Kab</b>	Pihak swasta dan kelompok peduli lainnya ikut berkontribusi dalam menangani permukiman kumuh perkotaan (keberhasilan)	15%	2	Jumlah BKM yang melakukan kemitraan dalam tahun penilaian lebih dari 20%		Jelaskan jumlah BKM bermitra dan nominal dana kemitraan
				1	Jumlah BKM yang melakukan kemitraan dalam tahun penilaian kurang dari 20%		
				0	Belum ada BKM yang melakukan kemitraan dalam tahun penilaian		

		pemasaran)				
4	<b>Pengurangan Luasan Kumuh</b>	Berkurangnya persentase luasan kumuh Kota/Kabupaten	15%	2	Jumlah pengurangan kumuh Kota/Kabupaten diatas 50%	Posisi awal berapa ha, posisi setelah di intervensi berapa ha
				1	Jumlah pengurangan kumuh Kota/Kabupaten dibawah 50%	
				0	Tidak Terjadi pengurangan kumuh	
5	<b>Pengelolaan database &amp; Mekanisme Pemantauan oleh Pemda</b>	Pengelolaan database dan mekanisme pemantauan informasi berkualitas yang dicirikan dengan informasi yang akurat, dapat dipastikan, penggambaran waktu sekarang, terorganisasi, mudah diakses dan berguna.	10%	2	Ada pengelolaan database dan mekanisme pemantauan yang berkualitas informasinya; dicirikan dengan informasi yang akurat, dapat dipastikan, penggambaran waktu sekarang, terorganisasi, mudah diakses dan berguna	Jelaskan sistem pengelolannya
				1	Sudah ada pengelolaan database dan mekanisme Pemantauan	
				0	Belum ada pengelolaan database dan mekanisme Pemantauan	
6	<b>Integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan</b>	Usulan kegiatan yang bersumber dari RPLP dan RP2KPKP yang diterima dalam Musrenbang Kab/kota dan didanai oleh APBD	10%	2	Ada usulan kegiatan yang bersumber dari RPLP dan RP2KPKP yang diterima dalam Musrenbang Kab/kota dan didanai oleh APBD	Kegiatan apa saja dan anggarannya berapa
				1	Ada usulan kegiatan yang bersumber dari RPLP dan RP2KPKP yang diterima dalam Musrenbang Kab/kota	
				0	Tidak ada usulan kegiatan yang bersumber dari produk perencanaan (RPLP dan RP2KPKP) yang diterima dalam Musrenbang Kab/kota dan didanai oleh APBD	
7	<b>Regulasi Penanganan</b>	Regulasi yang mendukung pencegahan	5%	2	Ada Perda, Perbup/Perwali, Surat Edaran Bupati/Walikota dan sudah di impementasikan	Sebutkan Regulasi yang ada dikota/kab lengkap

	<b>Kumuh</b>	dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota/Kabupaten (Perda, PerWal/Bup, SK)		1	Ada Perda, Perbup/Perwali, Surat Edaran Bupati/Walikota		
				0	Belum ada Perda, Perbup/Perwali, Surat Edaran Bupati/Walikota		
8	<b>Capacity Building (Pengembangan Kapasitas)</b>	Dukungan Pengembangan kapasitas oleh Pemda	5%	2	Pemda mengalokasikan dana dan melibatkan pihak ketiga (Lembaga/Perguruan Tinggi/dll) dalam pengembangan kapasitas untuk mendukung penanganan kumuh		Berapa dan lembaga apa saja
				1	Pemda mengalokasikan dana untuk pengembangan kapasitas dalam mendukung penanganan kumuh		
				0	Belum ada alokasi dana pengembangan kapasitas dari pemda untuk penanganan kumuh		
9	<b>Forum Kolaborasi Kota</b>	Forum Kolaborasi Kota terlibat dalam setiap kegiatan penanganan kumuh kota dan memiliki agenda yang jelas dalam upaya penanganan kumuh	5%	2	Forum Kolaborasi Kota terlibat dalam setiap kegiatan penanganan kumuh kota dan memiliki agenda yang jelas		Berikan gambaran keterlibatan, jumlah orang terlibat aktif
				1	Forum Kolaborasi Kota dilibatkan dalam kegiatan penanganan kumuh kota oleh Pemda		
				0	Forum Kolaborasi Kota tidak ada atau ada tapi tidak aktif.		
10	<b>Kinerja BKM/LKM</b>	Evaluasi kinerja BKM/LKM di Kota/Kabupaten	5%	2	100 % BKM sudah kategori Mandiri dan lebih dari 10 % diantaranya sudah kategori menuju madani.		Isi hasil mapping kelembagaan BKM
				1	BKM kategori Mandiri 100%		
				0	BKM dengan kategori Mandiri Kurang dari 100%		
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	